

ABSTRAK

Nama : Muhamad Baharudin Dasuki
Prodi : Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian
Judul : Analisis atas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang kemudian telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 pada Badan Pertimbangan ASN. Dengan bertransformasinya BAPEK menjadi BPASN tersebut tentu tuntutan masyarakat akan lahirnya suatu badan yang semakin kredibel dan profesional tidak terelakkan lagi. Salah satu kendala yang di hadapi oleh BPASN yaitu terkait dengan pemenuhan janji layanan penetapan putusan banding administratif, mengingat sesuai dengan amanat pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 BPASN wajib mengambil keputusan atas banding administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan banding tersebut. Hal ini mengalami pemangkasan janji layanan yang cukup signifikan bila kita bandingkan dengan peraturan terdahulu yang termaktub dalam pasal 9 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa BPASN wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini yaitu dengan cara melakukan dokumentasi, observasi, serta wawancara secara langsung dengan pegawai pada BPASN. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 semakin memperluas kewenangan BPASN serta semakin menjamin kepastian hukum bagi para ASN yang sedang mengajukan banding administratif. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 telah dapat diimplementasikan oleh BPASN, namun terkait dengan janji layanan penyelesaian banding administratif belum dapat diimplementasikan sepenuhnya karena sebagian besar permohonan banding administratif masih diputus melebihi 65 hari kerja.

Kata kunci: Banding Administratif, Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021

ABSTRACT

Name : Muhamad Baharudin Dasuki
Study Program : Public Administration – Human Resource Administration and Management
Title : Analysis of the Implementation of Government Regulation Number 24 of 2011 concerning the Personnel Advisory Board and Government Regulation Number 79 of 2021 concerning Administrative Measures and the ASN Advisory Board

This study aims to analyze how the implementation of Government Regulation Number 24 of 2011 which has been revoked and replaced by Government Regulation Number 79 of 2021 on the ASN Advisory Board. With the transformation of BAPEK into BPASN, of course the public's demand for the birth of an increasingly credible and professional body is inevitable. One of the obstacles faced by BPASN is related to fulfilling the service promise of determining administrative appeal decisions, considering that in accordance with the mandate of article 13 paragraph (4) of Government Regulation Number 79 of 2021 BPASN must make a decision on administrative appeals no later than 65 (sixty five) working days starting from the date of receipt of the appeal application. This is a significant reduction in service promise when compared to the previous regulation stipulated in article 9 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 2011 which states that BPASN must examine and make a decision within a maximum of 180 (one hundred and eighty) days from the receipt of the administrative appeal. The research method used by the author in preparing this Final Project is by conducting documentation, observation, and interviews directly with employees at BPASN. Based on the results of the author's research, the birth of Government Regulation Number 79 of 2021 further expands the authority of BPASN and further ensures legal certainty for ASNs who are filing administrative appeals. In general, it can be concluded that the provisions of Government Regulation No. 79 of 2021 can be implemented by BPASN, but related to the promise of administrative appeal settlement services cannot be fully implemented because most administrative appeals are still decided beyond 65 working days.

Keywords: *Administrative Appeals, Government Regulation Number 24 of 2011, Government Regulation Number 79 of 2021*